

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Harapan yang berbeda dari masyarakat mengenai wacana pembentukan Kabupaten Kundur terus bergulir, melalui hasil penelitian di lapangan pihak yang terlibat tidak hanya berasal dari Pemerintah Daerah tetapi juga Pemerintah Pusat yang ikut memberikan jalan keluar terhadap permasalahan ini. Peneliti akan mengambil kesimpulan dalam bentuk yang konkrit dan mudah dipahami, serta saran-saran tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan untuk diterapkan. Permasalahan yang terus saja bergulir membuat kita berpikir bagaimana agar Pemerintah daerah di Kecamatan Kundur bisa menerima dengan baik masukan-masukan atau aspirasi dari masyarakat Kundur dengan bijak.

#### **A. Kesimpulan**

Penulis menyimpulkan ke dalam beberapa poin sebagai berikut :

Adanya wacana mengenai perubahan wilayah kecamatan menjadi kabupaten di Kecamatan Pulau Kundur ini tidak lepas dari tuntutan terhadap kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah, khususnya kepada pemerintah daerah. Tuntutan yang dimaksud disini adalah masyarakat menginginkan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur yang layak bagi masyarakat Kundur, sangat mengherankan ketika Pulau dengan penghasil karet yang cukup besar tetapi pembangunan fasilitas umum di sana sangat minim.

Namun yang terjadi tidak ada perspektif yang sama untuk mewujudkan keinginan ini, Pemerintah Daerah tetap saja berada pada koridor untuk menguasai, saling berebut kekuasaan, tidak hanya itu, sebagian dari masyarakat tidak mau kalah untuk membentuk suatu komunitas atau kelompok tertentu dalam mencapai tujuan tertentu pula. Namun pada kenyataannya masyarakatlah yang merasa dampak dari kebijakan pemerintah daerah, meskipun adanya otonomi daerah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi dari masyarakat sendiri merasakan zaman itu tidak berubah, mereka masih merasakan suasana yang sama dengan masa orde lama dan orde baru, tidak ada perubahan yang signifikan seperti yang telah dijanjikan oleh pemerintah daerah. Dari situlah muncul suatu solusi bagaimana caranya infrastruktur dan suprastruktur dapat dibangun dengan adanya pemekaran wilayah yang nantinya Kunder akan segera menjadi suatu Kabupaten baru, masyarakat Kunder beranggapan bahwa dengan Kunder menjadi Kabupaten baru maka suprastruktur dan infrastruktur dapat segera dibangun.

#### 1. Partisipasi Masyarakat

##### a. *Citizen Control* (Kendali Masyarakat)

Dalam proses pemekaran wilayah Kecamatan menjadi Kabupaten keinginan masyarakat adalah tahap awal dalam merancang rencana untuk pemekaran wilayah. Keinginan masyarakat Kunder ini dapat ditampung melalui aspirasi masyarakat Kunder kemudian Pemerintah Daerah menanggapi hal tersebut, Keikutsertaan masyarakat di dalam proses pemekaran ini, terlihat jelas berdasarkan hasil observasi di lapangan keikutsertaan masyarakat ini diiringi dengan segala tuntutan pemekaran

dalam hal ini banyaknya masyarakat turun kejalan menuju kantor pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk menyalurkan aspirasi tentang pemekaran dan diikuti mengaspirasikan tuntutan-tuntutan sebagian besar masyarakat di Kunder.

Masyarakat pulau Kunder memiliki alasan kuat kenapa mereka ingin memisahkan diri dari kabupaten Karimun, mereka beranggapan bahwa untuk seukuran pulau Kunder dengan Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu besar penghasil karet terbesar di Kepulauan Riau sangat disayangkan kehidupan mereka jauh dari kata merdeka, pembangunan tidak merata dan kurangnya fasilitas kesehatan disana, bahkan beberapa dari masyarakat Kunder mengatakan bahwa jika ada kerabat yang sakit parah mereka harus di bawa kerumah sakit yang berada di seberang lautan pulau Kunder yang terletak di kabupaten Karimun dan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar.

b. *Consultation* (Konsultasi)

Konsultasi pada partisipasi masyarakat selanjutnya adalah dimana dari masing-masing kepala desa di 3 kecamatan berbeda dikumpulkan kemudian membentuk suatu musyawarah kecil, dimana di musyawarah tersebut akan membahas kenapa Kunder ingin memisahkan diri dari kabupaten Karimun, untuk memiliki alasan kuat agar nantinya Kunder akan segera terbentuk sebuah kabupaten baru. Meskipun terdapat beberapa masyarakat yang pro dengan wacana tersebut dan ada juga yang kontra namun hal tersebut tidak menjadi masalah besar bagi Kunder untuk segera menjadi kabupaten baru.

Dari musyawarah tersebut Proses selanjutnya dalam pemekaran wilayah lahirlah suatu Kelompok dimana Kelompok tersebut sebagai gerakan dan pemersatuan seluruh masyarakat Kecamatan Kundur yang sama-sama berkeinginan Kundur segera menjadi Kabupaten, yang biasa disebut sebagai Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3), tidak hanya itu badan juga berperan penting dalam proses pemekaran wilayah di pulau Kundur yang nantinya akan menjadi sebuah kabupaten baru.

c. *Informing* (Menginformasikan)

Lewat informasi badan ini bertanggung jawab penuh atas semua informasi yang telah didapat kemudian akan disebarkan kepada masyarakat kundur untuk mengetahui perkembangan proses pemekaran wilayah Kundur untuk saat ini, Setelah Badan ini terbentuk mereka sebagai aktor utama dalam pemekaran wilayah Kundur dikarenakan masyarakat Kundur sudah menaruh kepercayaannya kepada Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3), Saat ini mereka sudah melewati tahap penghitungan skor dan prioritas kabupaten-kabupaten yang ingin dimekarkan sampai dengan mengitung jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Namun saat ini Kundur mengalami beberapa kendala seperti APBN 2016 tidak dianggarkan untuk pemekaran sehingga anggaran dari pemerintah pusat tidak bisa turun hal tersebut tentu menjadi permasalahan besar, untuk bisa melakukan tahap uji coba Kundur membutuh anggaran dari pemerintah pusat.

Untuk saat ini Kundur sedang melakukan Tahap uji coba, Namun sayangnya untuk saat ini pemekaran Kundur terhambat dikarenakan anggaran dari pemerintah

pusat tidak kunjung turun dikarenakan Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2016 tidak dianggarkan untuk pemekaran sehingga, pemekaran kabupaten kundur untuk saat ini bisa dikatakan terhenti, padahal di kecamatan Kundur sendiri sudah di persiapkan calon kantor pemerintah Kabupaten Kundur. Yang dimaksud dengan tahap uji coba adalah. Kundur akan diberikan sedikit Bantuan berupa perbaikan jalan, dan pemberdayaan petani karet, dari situ akan dilihat apabila dalam jangka waktu 1 tahun Kundur mengalami kenaikan atau sedikit kemajuan maka Kundur dinyatakan berhasil dan layak menjadi Kabupaten baru dan sebaliknya apabila Kundur tidak bisa mengembangkan wilayahnya maka Kundur dinilai gagal dalam mengembangkan wilayahnya dan dinyatakan tidak layak sebagai Kabupaten baru

## 2. Tindakan Pemerintah Daerah Secara Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Proses Pemekaran

Sikap yang ditunjukkan oleh Pemerintah Kecamatan dalam menangani kasus antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap proses pemekaran yang terjadi di kecamatan Kundur adalah berikap netral dalam arti tidak memberikan dukungan penuh kepada masyarakat yang sedang berkontroversi tersebut, dengan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh terhadap isu ataupun wacana yang ada yang nantinya akan membawa pada keadaan menjadi tidak kondusif adalah bentuk tindakan secara persuasif yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kundur ini.

## **B. Saran**

Pemaparan penulis mengenai kesimpulan Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Proses Pemekaran Wilayah di Kabupaten Karimun membawa pada saran-saran yang akan disampaikan, dengan harapan dapat memberikan masukan khususnya kepada Pemerintah Daerah, berikut adalah saran penulis:

1. Untuk masyarakat Pemekaran wilayah bukanlah satu-satunya jalan agar masyarakat bisa hidup sejahtera, mungkin saja ada cara lain seperti memberikan aspirasi yang lebih agresif lagi kepada pemerintah agar aspirasi masyarakat Kundur bisa didengar oleh pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah seharusnya lebih memerhatikan daerah-daerah yang Sumber Daya Alamnya sangat baik seperti Kundur, seharusnya Pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan satu titik pulau Kundur saja tetapi harus memperhatikan semua titik Kundur yang berpotensi menghasilkan Sumber Daya Alam yang baik, seperti memperbaiki jalanan berlobang, memberikan fasilitas kesehatan yang layak, dan menambah satu kantor daerah pembantu di pulau Kundur.
3. Seharusnya Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kundur (BP2K3) lebih aktif lagi dalam merencanakan proses pemekaran wilayah Kabupaten Kundur agar tidak selamanya menunggu kabar dari Pemerintah Pusat, mungkin ada baiknya diusahakan kembali dengan cara diadakannya rapat pimpinan dewan daerah agar bisa dimintai kejelasannya tentang wacana Pemekaran wilayah ini.

4. Adanya realisasi dengan cepat terhadap perbaikan, pembangunan jalan menuju desa terpencil, dan membangun fasilitas kesehatan umum seperti rumah sakit di Kecamatan Kundur, atau minimal mungkin Pemerintah Daerah menyediakan alat-alat kesehatan yang lebih lengkap untuk puskesmas agar masyarakat Kundur bisa ditangani oleh pihak puskesmas tanpa harus pergi ke Kabupaten Karimun.